



Kerja Sama Keamanan Indonesia dan Malaysia dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Pulau Sebatik

Zahrhan Hilman Salim B.Pawe^{1*}, Seniwati²

¹⁻² Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90245

*Korespondensi penulis: zahrhanpawe@gmail.com

Abstract: *Sebatik Island, which is located on the border of Indonesia and Malaysia, is a very strategic area but is vulnerable to illegal immigration problems. The unclear geography, as well as the social and economic dependence of the community on Malaysia, worsens the situation by creating illegal crossing routes that are difficult to monitor. This article explores various collaborative efforts made by Indonesia and Malaysia to strengthen supervision and law enforcement in the Sebatik Island area. These efforts include joint patrols, cross-border coordination, improving immigration facilities, and more integrated law enforcement. However, obstacles such as differences in policy, limited personnel and the strength of smuggling networks still hamper the effectiveness of border management. For this reason, more intensive cooperation is needed, to ensure the protection of state sovereignty and the welfare of border communities.*

Keywords: *Maritime security, Sebatik Island, illegal immigration, Indonesia-Malaysia cooperation, borders, surveillance, law enforcement.*

Abstrak: Pulau Sebatik, yang terletak di perbatasan Indonesia dan Malaysia, merupakan wilayah yang sangat strategis namun rentan terhadap masalah imigrasi ilegal. Geografis yang kurang jelas, serta ketergantungan sosial dan ekonomi masyarakat terhadap Malaysia, memperburuk situasi dengan menciptakan jalur-jalur perlintasan ilegal yang sulit diawasi. Artikel ini mengeksplorasi berbagai upaya kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Pulau Sebatik. Upaya tersebut meliputi patroli gabungan, koordinasi lintas negara, peningkatan fasilitas keimigrasian, dan penegakan hukum yang lebih terintegrasi. Meski demikian, kendala seperti perbedaan kebijakan, keterbatasan personel, dan kuatnya jaringan penyelundup masih menghambat efektivitas pengelolaan perbatasan. Untuk itu, diperlukan kerja sama yang lebih intensif, guna memastikan perlindungan kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Kata kunci: Keamanan maritim, Pulau Sebatik, imigrasi ilegal, kerja sama Indonesia-Malaysia, perbatasan, pengawasan, penegakan hukum.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan letak geografis yang sangat strategis, baik dalam konteks ekonomi global maupun dinamika geopolitik kawasan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan total luas wilayah daratan mencapai sekitar 1.826.440 kilometer persegi. Wilayah perairannya meliputi sekitar 2,8 juta kilometer persegi, yang mencakup 92.877 kilometer persegi perairan pedalaman serta terdiri dari 18.108 pulau. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan yang menjadi penghubung antar pulau (Hutomo., et al, 2023). Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada integrasi antarwilayah yang ditopang oleh konektivitas maritim.

Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis di antara dua samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia. Posisi ini menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai salah satu jalur utama lintasan perdagangan internasional kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara, yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, India, Papua Nugini, Timor Leste, Palau, dan Australia (Febiana R & Burhanuddin, 2023). Kondisi ini menjadikan perbatasan Indonesia sebagai wilayah penting dalam aspek pertahanan dan keamanan nasional.

Pulau Sebatik ini berada tepat di garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia memiliki kondisi batas wilayah yang kurang tegas, ditandai hanya dengan keberadaan patok-patok sederhana. Ketidakjelasan batas ini menciptakan celah bagi terjadinya mobilitas lintas negara secara tidak resmi, baik oleh warga Indonesia maupun Malaysia. Bahkan, di beberapa lokasi, terdapat permukiman penduduk yang secara fisik terbagi antara kedua negara sebagian berada di wilayah kedaulatan Indonesia, sementara bagian lainnya termasuk dalam wilayah Malaysia (Kompas.com, 2020). Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya penegasan dan pengelolaan batas wilayah secara menyeluruh, tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Kondisi geografis dan sosial Pulau Sebatik berpotensi menimbulkan kerawanan dalam bentuk melemahnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat setempat. Kerentanan ini muncul sebagai akibat dari interaksi yang intens dan rutin antara warga Sebatik dengan warga negara asing, khususnya warga Malaysia, yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya mobilitas lintas batas ini terjadi karena wilayah perbatasan berfungsi sebagai jalur utama keluar masuk bagi berbagai aktivitas warga negara asing ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Situasi tersebut dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran kedaulatan serta menimbulkan potensi ancaman terhadap integritas nasional dan identitas kebangsaan masyarakat perbatasan (Wahyudi, 2022).

Faktor lain yang turut mendorong maraknya perlintasan ilegal di wilayah perbatasan ini adalah tingginya biaya serta jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk mengurus dokumen resmi. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat enggan melalui prosedur legal dan lebih memilih menggunakan jalur-jalur tidak resmi yang minim pengawasan. Ketergantungan ekonomi masyarakat Sebatik terhadap Malaysia juga menjadi faktor signifikan. Kesenjangan ini semakin diperparah oleh rendahnya tingkat pembangunan serta terbatasnya fasilitas infrastruktur dan pelayanan publik di sisi wilayah perbatasan Indonesia.

Akibatnya, sebagian warga memilih mencari penghidupan di Malaysia, bahkan ditemukan adanya warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda atau berpindah kewarganegaraan secara tidak sah (Siregar, et al, 2019). Oleh karena itu, perlu ada pendekatan dari pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan ini untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap negara tetangga.

Permasalahan yang dihadapi di wilayah perbatasan Indonesia semakin kompleks, tidak hanya karena kondisi geografisnya yang terpencil dan sulit dijangkau, tetapi juga karena wilayah-wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara lain. Kedekatan fisik antarnegara ini menyebabkan berbagai isu, seperti imigrasi ilegal, penyelundupan barang, perdagangan manusia, serta sengketa wilayah, tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh pemerintah Indonesia. Setiap tindakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek hubungan bilateral dan tidak boleh melanggar kedaulatan negara tetangga (Anandara & Kusumawardhana, 2023). Upaya penyelesaian masalah perbatasan harus melibatkan koordinasi yang erat antara pemerintah Indonesia dan negara tetangga untuk memastikan keamanan dan kestabilan di kawasan perbatasan.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara bertetangga yang secara geografis memiliki batas langsung, baik darat maupun laut, yang membentang di beberapa wilayah strategis seperti Kalimantan, Sebatik, dan perairan Selat Malaka. Kedekatan wilayah ini menjadikan kedua negara terlibat secara langsung dalam berbagai dinamika perbatasan yang kompleks, mencakup dimensi keamanan, politik, dan sosial ekonomi. Dalam aspek keamanan, kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dihadapkan pada berbagai persoalan serius yang bersifat transnasional, seperti penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan barang kebutuhan pokok, hingga peredaran narkoba lintas negara (Anandara & Kusumawardhana, 2023). Aktivitas-aktivitas ilegal ini tidak hanya mengancam stabilitas keamanan nasional, tetapi juga merugikan ekonomi negara, merusak lingkungan, dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Masalah imigran ilegal di Pulau Sebatik merupakan tantangan serius yang memerlukan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia. Letaknya yang berada tepat di perbatasan kedua negara membuat wilayah ini sangat rentan terhadap aktivitas lintas batas yang tidak resmi. Oleh karena itu, kerja sama bilateral menjadi hal yang penting untuk memperkuat pengawasan, mencegah pelanggaran perbatasan, dan melindungi masyarakat di wilayah perbatasan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerja sama keamanan antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi imigran ilegal di Pulau Sebatik dapat dianalisis melalui pendekatan **Teori Keamanan Maritim** dan **Teori Kerja Sama Internasional**. Teori Keamanan Maritim menjelaskan bahwa wilayah perairan sekitar Pulau Sebatik merupakan area strategis yang rawan terhadap ancaman non-tradisional seperti imigrasi ilegal dan penyelundupan manusia, sehingga membutuhkan pengawasan ketat. Sementara itu, Teori Kerja Sama Internasional menekankan bahwa kerja sama ini muncul karena adanya kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas perbatasan.

Teori Keamanan Maritim

Keamanan maritim merujuk pada kondisi di mana wilayah laut suatu negara bebas dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban di perairan, seperti sengketa antarnegara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, peredaran barang ilegal, kejahatan terhadap lingkungan, serta bencana dan kecelakaan laut. Ancaman terhadap keamanan maritim ini bersifat lintas negara, tergolong dalam kategori ancaman non-tradisional, dan memiliki potensi besar untuk memengaruhi stabilitas keamanan negara-negara yang terlibat dalam kawasan maritim tersebut (Sajidin, et al, 2023).

Keamanan maritim berkaitan erat dengan upaya negara dalam menjaga batas laut dan yurisdiksinya dari berbagai Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu kedaulatan. Di negara kepulauan seperti Indonesia, kejahatan transnasional lintas negara seperti penyelundupan dan imigrasi ilegal marak terjadi akibat luasnya wilayah laut dan lemahnya pengawasan (Sajidin, et al, 2023). Karena itu, penguatan pengamanan maritim dan kerja sama dengan negara tetangga, seperti Malaysia, menjadi strategi penting untuk mengatasi ancaman tersebut secara efektif.

Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan suatu bentuk interaksi yang melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, dalam rangka mencapai tujuan bersama di tingkat global. Definisinya mencakup spektrum yang luas, baik dari sisi isu yang diangkat maupun entitas yang terlibat, yang tidak terbatas pada individu, melainkan juga mencakup institusi, organisasi, dan kelompok kolektif lainnya yang memiliki kepentingan tertentu dalam sistem internasional (Dai & Sampson, 2010).

Dalam praktiknya, kerja sama internasional telah berkembang sebagai suatu proses koordinatif yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan, perdamaian, dan stabilitas dalam sistem internasional (Pierre., et al, 2024). Peran utama dari kerja sama ini terletak pada kemampuannya dalam membangun kepercayaan dan solidaritas antarnegara, yang menjadi fondasi bagi terbentuknya tatanan global yang lebih stabil. Melalui instrumen diplomasi, perjanjian multilateral, serta berbagai mekanisme kerja sama di tingkat regional maupun global, negara-negara dapat menyatukan kepentingan mereka dan secara kolektif menghindari potensi konflik yang bersumber dari kompetisi antaraktornya.

Teori Kerja Sama Internasional ini menjelaskan bahwa hubungan antarnegara dalam menghadapi isu-isu bersama, seperti keamanan perbatasan, dapat terbentuk karena adanya kepentingan rasional dan kebutuhan fungsional yang mendesak. Dalam konteks kerja sama Indonesia dan Malaysia, kedua negara menyadari adanya interdependensi keamanan, khususnya di wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik yang rentan terhadap kejahatan lintas negara, seperti imigrasi ilegal dan penyelundupan. Teori ini menyoroti bahwa kerja sama internasional dapat terwujud meskipun dalam lingkungan internasional yang anarkis, selama terdapat tujuan bersama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang kerja sama keamanan antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani imigran ilegal di Pulau Sebatik. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara, serta langkah-langkah pengamanan yang diterapkan di wilayah perbatasan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses kerja sama tersebut, seperti perbedaan kebijakan, keterbatasan pengawasan, dan kondisi geografis. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menggambarkan situasi secara menyeluruh dan kontekstual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

Pulau Sebatik adalah wilayah perbatasan yang terbagi antara Indonesia (Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara) dan Malaysia (Negeri Sabah), sehingga memiliki posisi yang strategis sekaligus kompleks. Letaknya yang terbuka dan berada di jalur lintas batas menjadikan pulau ini rawan terhadap berbagai aktivitas ilegal, seperti imigrasi gelap, penyelundupan barang, dan perdagangan manusia. Faktor geografis, kedekatan sosial-budaya

antarwarga di kedua sisi, serta keterbatasan pengawasan di wilayah perbatasan turut memperbesar potensi terjadinya kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, Pulau Sebatik menjadi kawasan penting dalam kerja sama keamanan antara Indonesia dan Malaysia untuk menjaga stabilitas serta mengurangi risiko ancaman di wilayah perbatasan.

Bentuk Kerja Sama dan Upaya Pengamanan Imigran Ilegal di Pulau Sebatik

Untuk memahami secara menyeluruh dinamika penanganan imigran ilegal di Pulau Sebatik, perlu dijabarkan beberapa poin penting terkait bentuk kerja sama dan upaya pengamanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Poin-poin berikut akan menguraikan berbagai mekanisme koordinasi, kebijakan bilateral, hingga langkah-langkah teknis di lapangan yang menjadi bagian dari strategi kedua negara dalam menjaga keamanan kawasan perbatasan.

➤ **Patroli Gabungan dan Pengawasan Ketat**

Aparat keamanan yang terdiri dari TNI khususnya Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Polri, serta sejumlah instansi terkait seperti Imigrasi, secara rutin melakukan patroli dan operasi gabungan di wilayah perbatasan Pulau Sebatik. Kegiatan ini difokuskan pada pengawasan jalur-jalur tidak resmi atau "jalur tikus" yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku imigrasi ilegal karena minim pengawasan dan aksesibilitasnya yang tersembunyi. Operasi-operasi tersebut menjadi bagian dari strategi preventif dan represif untuk mendeteksi serta menggagalkan aktivitas lintas batas ilegal, baik dari arah Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya. Dalam banyak kasus, patroli ini berhasil mengidentifikasi dan menghentikan upaya penyelundupan imigran ilegal, sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan kejahatan transnasional yang memanfaatkan celah di kawasan perbatasan (Marison, 2025).

➤ **Koordinasi Lintas Negara**

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menunjukkan komitmen bersama untuk melawan perdagangan dan penyelundupan manusia. Kerjasama bilateral ini telah menghasilkan sejumlah perjanjian, antara lain: Perjanjian Kerjasama Bilateral untuk Pemberantasan Perdagangan Orang, Perjanjian Kerjasama Bilateral mengenai Penanggulangan Penyelundupan Migran dan Imigrasi Ilegal, serta pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia mengenai perlindungan pekerja migran.

Kedua negara telah menyepakati untuk saling bertukar informasi yang dapat dimanfaatkan oleh kedua pihak dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak kejahatan (Sihite., et al, 2024).

➤ **Peningkatan Fasilitas dan Layanan Keimigrasian**

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan di Pulau Sebatik dengan mendirikan Unit Layanan Paspor (ULP) dan meningkatkan kesiapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pendirian ULP di Pulau Sebatik bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dalam mengurus dokumen perjalanan secara legal dan formal, sehingga mereka dapat melaksanakan mobilitas antarnegara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peningkatan kesiapan PLBN berfungsi untuk mengawasi pergerakan orang dan barang di titik perbatasan yang rawan penyelundupan dan kejahatan lintas negara. Langkah-langkah ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah perlintasan ilegal, tetapi juga memberikan efek jera bagi mereka yang mencoba melanggar aturan imigrasi, baik melalui penyelundupan maupun upaya imigrasi ilegal (Kediripedia Media Utama, 2024). Malaysia juga mendukung program pelatihan dan pengelolaan pekerja migran secara legal.

➤ **Penegakan Hukum Terpadu**

Kedua negara, Indonesia dan Malaysia, telah menunjukkan komitmen untuk melakukan penindakan tegas terhadap imigran ilegal dan pelaku penyelundupan dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terpadu. Dalam upaya ini, koordinasi antara aparat keamanan kedua negara, seperti kepolisian, imigrasi, dan lembaga terkait lainnya, memastikan bahwa operasi-operasi ini berjalan efektif dan efisien. Anggota Satgas Pamantas RI-Malaysia akan terus memperkuat pengawasan di sepanjang jalur perbatasan guna mencegah terjadinya aktivitas ilegal .

Tantangan dan Kendala

Meskipun kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani imigran ilegal di Pulau Sebatik telah menunjukkan berbagai kemajuan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala. Berikut tantangan dan kendala yang hadapi:

➤ **Banyaknya Jalur Tikus**

Pulau Sebatik merupakan wilayah perbatasan yang secara geografis memiliki banyak celah atau jalur perlintasan tidak resmi yang dikenal sebagai jalur tikus. Jalur-jalur ini tersebar di berbagai titik dan kerap digunakan oleh imigran ilegal serta pelaku penyelundupan untuk keluar masuk wilayah tanpa melalui pemeriksaan resmi. Tantangan utama dalam mengawasi jalur-jalur ini adalah keterbatasan personel aparat keamanan, baik dari TNI maupun Polri, yang jumlahnya tidak sebanding dengan luas wilayah. Kondisi ini menyebabkan lemahnya kontrol terhadap aktivitas lintas batas ilegal, sehingga berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti imigrasi ilegal dan perdagangan barang terlarang masih sering terjadi (Siregar., et al, 2019).

➤ **Ketergantungan Ekonomi Masyarakat Sebatik pada Malaysia**

Ketergantungan masyarakat Pulau Sebatik terhadap Malaysia dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan kegiatan ekonomi sehari-hari menjadi salah satu faktor yang mempersulit pengendalian imigrasi ilegal di wilayah tersebut. Kondisi ini muncul karena pembangunan infrastruktur dan layanan publik di sisi Indonesia belum merata dan belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan warga lokal. Akibatnya, banyak penduduk yang memilih untuk menyeberang ke wilayah Malaysia secara tidak resmi. Praktik ini, yang berlangsung secara rutin dan turun-temurun, memperkuat pola perlintasan ilegal dan menjadikan batas negara tidak lagi dihormati sebagai garis pemisah yang tegas (Siregar., et al, 2019).

➤ **Biaya dan Akses Layanan Keimigrasian yang Mahal dan Jauh**

Salah satu faktor yang mendorong imigran ilegal di Pulau adalah keterbatasan akses terhadap dokumen resmi. Proses pengurusan dokumen tersebut sering kali memerlukan perjalanan jauh ke kantor imigrasi serta biaya yang tidak sedikit. Bagi masyarakat yang hidup dengan keterbatasan ekonomi dan mobilitas, hal ini menjadi beban tambahan yang tidak mudah dipenuhi. Akibatnya, banyak warga lebih memilih menggunakan jalur tidak resmi yang dianggap lebih cepat, mudah, dan murah, meskipun melanggar hukum.

➤ **Perbedaan Kebijakan**

Penanganan imigran ilegal di wilayah perbatasan Pulau Sebatik memerlukan kerja sama lintas negara yang kuat dan terkoordinasi. Namun, perbedaan kebijakan, regulasi, dan prosedur antara Indonesia dan Malaysia sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan penanganan yang terpadu. Misalnya, perbedaan dalam sistem hukum, pendekatan terhadap imigran, atau mekanisme deportasi dapat mengakibatkan ketidaksepahaman di lapangan. Selain itu, koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dari kedua negara belum berjalan secara optimal (Sihite., et al, 2024)

➤ **Jaringan Penyalur Imigran Ilegal**

Budaya masyarakat di wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik telah terbentuk selama bertahun-tahun dengan kebiasaan melakukan aktivitas lintas negara. Kebiasaan ini diperkuat oleh keberadaan jaringan penyalur tenaga kerja ilegal yang telah beroperasi secara sistematis dan terorganisir. Jaringan ini memanfaatkan celah hukum, minimnya pengawasan, serta kebutuhan ekonomi masyarakat untuk merekrut dan mengirimkan pekerja secara ilegal ke Malaysia. Kombinasi antara kebiasaan sosial yang telah mengakar dan kekuatan jaringan ilegal ini menjadikan upaya pemberantasan imigrasi ilegal sangat kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh struktur sosial dan ekonomi lokal yang sudah mapan (Kompas.id, 2022).

Secara keseluruhan, masalah imigrasi ilegal di wilayah perbatasan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi wilayah, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, kelemahan dalam lembaga terkait, serta dinamika politik. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kerja sama yang lebih kuat dan terarah antara berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai wilayah perbatasan yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia, Pulau Sebatik rentan terhadap aktivitas lintas negara yang tidak resmi, seperti imigrasi ilegal, perdagangan manusia, dan penyelundupan barang. Kondisi geografis yang sulit diawasi, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap Malaysia, serta keterbatasan akses terhadap dokumen resmi memperburuk situasi ini. Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia menjadi kunci utama dalam penanganan masalah ini. Melalui patroli gabungan, koordinasi lintas negara, serta peningkatan layanan keimigrasian, kedua negara berupaya mengurangi aktivitas ilegal di

wilayah perbatasan. Namun, tantangan seperti banyaknya jalur tikus, perbedaan kebijakan, dan keberadaan jaringan penyalur tenaga kerja ilegal tetap menjadi hambatan signifikan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif, baik dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, maupun pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Anandara, & Kusumawardhana. (2023). Tapal batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia dalam diplomasi dan konflik perbatasan dengan Malaysia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(4).
- Beranda Post. (2025, Januari 22). Satgas Pamtas RI-Malaysia gagalkan pengiriman imigran ilegal. <https://berandapost.com/2025/01/22/satgas-pamta-ri-malaysia-gagalkan-pengiriman-imigran-ilegal/>
- Dai, X., & Sampson, M. (2010). International cooperation theory and international institutions (pp. 2–3). <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>
- Febiana, R., & Burhanuddin, A. (2023). Implementasi kebijakan sekuritisasi maritim Presiden Jokowi dalam menghadapi aktivitas ilegal di perairan Indonesia. *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, 4(2). <https://doi.org/10.17509/ijom.v4i1.60298>
- Gunawan, T. (2024). Harmony in leadership. *Nation State: Journal of International Studies*, 6(2), 158–178. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i2.1277>
- Hutomo, B. W., Marsetio, Rudyanto, Widodo, P., Saragih, H., & Suwarno, P. (2023). Kontribusi Indonesia dalam isu kawasan Indo-Pasifik melalui kebijakan Global Maritime Fulcrum. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Kediripedia Media Utama. (2024, Mei 16). Berdirinya unit layanan paspor menguatkan Pulau Sebatik sebagai bagian NKRI. <https://kediripedia.com/berdirinya-unit-layanan-paspor-menguatkan-pulau-sebatik-sebagai-bagian-nkri/>
- Kompas.com. (2020, September 17). Tito sebut tak ada batas jelas antara Indonesia-Malaysia di Sebatik. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/12194971/tito-sebut-tak-ada-batas-jelas-antara-indonesia-malaysia-di-sebatik>
- Kompas.id. (2022, Agustus 3). Penyelundupan pekerja migran ke Malaysia melalui Nunukan tak melulu disebabkan persoalan geografis. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/03/penyelundupan-pekerja-migran-ke-malaysia-melalui-nunukan-tak-melulu-disebabkan-persoalan-geografis>
- Marison, W. (2025). TNI AL gagalkan penyelundupan calon pekerja migran ilegal ke Malaysia. *ANTARA News*. <https://m.antaranews.com/amp/berita/4783465/tni-al-gagalkan-penyelundupan-calon-pekerja-migran-ilegal-ke-malaysia>

- Payon, M., Foju, M., & Arman. (2023). Dampak perubahan titik batas di Pulau Sebatik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif prinsip uti possidetis. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(5).
- Pierre, et al. (2024). International cooperation in international relations. *Diplomatie: Affaires Stratégiques et Relations Internationales*, 5–11.
- Sajidin, et al. (2023). Strategi keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional di Asia Tenggara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(3).
- Sihite, et al. (2024). Tantangan kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam perspektif ekonomi: Perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia dari perdagangan dan penyelundupan manusia. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1).
- Siregar, et al. (2019). Ancaman keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia: Studi kasus Pulau Sebatik dan Tawau (Indonesia-Malaysia). *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(1).
- Wahyudi. (2022). Pembinaan bela negara bagi masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia dalam memperkuat nasionalisme (sebuah studi kasus di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara).